

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

MENGAPRESIASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM YANG INKLUSIF-MULTIKULTURAL

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Preprint
Authors	Arif, Mahmud
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-24 00:01:45
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/183895

**MENGAPRESIASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
YANG INKLUSIF-MULTIKULTURAL**
Perspektif Universalitas Islam yang “Mengindonesia”

Mahmud Arif

(Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
E-mail: marifnurch@yahoo.co.id, HP.08122743055)

Abstract

It is needed to recognize that because of wisdom from the founding fathers in electing Unity in Diversity as a principle basing plurality of our citizenship life, ideas for Union State of Indonesian Republic (NKRI) have been inherited to the next generation until nowadays after having been protected with great efforts of the beloved fatherland heroes. Properly, that fact inspire us, the well educated generation, to reflect such wisdom and to articulate it in the realm of our citizenship life so our presence can be received contributive to spin national harmony and integrity. In popular concept, such wisdom is named by multicultural recognition that is facing serious problems caused by prevalence of provincialism and sectarianism temptations in disorder of our citizenship life. In the mentioned context, efforts to build multicultural recognition of the young generation must be driven through many education activities, including Islamic religion education (PAI). In this case, religion education has a duty in transferring inclusive-multicultural Islamic teachings to students so that they are able to appreciate universality values of Islam, like inclusivism, humanism, tolerance, and democracy. Therefore, Islamic religion education activities truly needed is “teaching religion” in the frame of “teaching religiosity”, that is education activities do not only introduce students to their religion teachings but also introduce them to their religion’s humanity vision and it’s universal values. Besides that, religion education activities must be avoided from domestication and indoctrination processes through making them be more dialogical.

Pendahuluan

Dimaklumi secara luas, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dengan demikian, Islam sebenarnya berpeluang besar dalam mempengaruhi tata hidup kemasyarakatan dan kebangsaan di tanah air. Menyadari hal itu, A. Syafi’i Ma’arif menegaskan bahwa sebagai penduduk mayoritas semestinya umat Islam tidak lagi sibuk mempersoalkan hubungan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Ketiga konsep ini haruslah ditempatkan dalam satu nafas sehingga Islam yang mau dikembangkan di Indonesia adalah sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa dan negara (Ma’arif, 2009:15). Karena itu, tidak perlu dikhawatirkan corak Islam Indonesia yang diwarnai oleh unsur-unsur lokal dan global yang memang tak bisa terhindarkan, sepanjang tidak

larut dan hanyut dalam unsur-unsur lokal yang negatif dan terbelakang, serta tidak terseret oleh arus global yang mengundang malapetaka umat Islam Indonesia.

Pada tahun 2000 lalu, tidak kurang dari empat ratus ilmuwan independen, yang diprakarsai oleh Prof. Nurcholish Madjid, Prof. Emil Salim, dan lain-lain berkumpul di Bali untuk mencari solusi terhadap keterpurukan total negara kita. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya pendidikan multikultural. Paling tidak ada dua hal yang patut digarisbawahi terkait dengan rekomendasi itu. *Pertama*, mereka sepakat bahwa carut-marut kehidupan masyarakat yang majemuk ini dalam berbangsa dan bernegara ikut diperparah oleh munculnya eskalasi konflik, baik secara vertikal maupun horisontal. Dalam kaitan ini, eskalasi konflik dinilai sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan integrasi nasional di bawah naungan NKRI. *Kedua*, sistem pendidikan yang berjalan selama ini, termasuk pendidikan agama, dianggap belum berhasil memerankan fungsinya membina kearifan tunas-tunas bangsa dalam menyikapi realitas sosial-budaya yang plural. Akibatnya, kesadaran tunas-tunas bangsa akan kebhinekaan dan penghargaan mereka terhadap perbedaan sebagai dasar semangat kebangsaan terhimpit oleh desakan yang kian merangsek dari kepentingan primordialistik, semisal sektarianisme dan provinsialisme.

Bisa disaksikan, banyak konflik kekerasan, mulai dari antar individu, antar elit, antar kelompok, antar kampung hingga antar suku di tanah air, yang disebabkan oleh persoalan tidak adanya pemahaman multicultural (Zamroni, 2007:267), mengingat keragaman dan kemajemukan kultur (budaya), terutama ketika bersinggungan dengan ranah keagamaan, acapkali direspons dengan sikap dan perilaku monolog-monokultur yang sarat dengan klaim kebenaran, klaim keselamatan, dan klaim memperadabkan. Sekedar contoh dari sikap dan perilaku tersebut, salah seorang dari tiga terpidana mati bom Bali, Mukhlas alias Ali Ghufron, pernah berucap dengan penuh semangat: “Selama 10 tahun di Madinah, Nabi Saw berhaji hanya satu kali dan umroh hanya tiga kali, tetapi beliau melakukan peperangan melawan orang kafir sebanyak tujuh puluh kali...*Allahu Akbar*”. Ironisnya, sikap dan perilaku semacam itu dikembangkan secara sistematis melalui dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama, yang cenderung menghasilkan manusia absolut, *mutlak-mutlakan* (Baidhawiy, 2005:13). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian PPIM IAIN (sekarang UIN) Jakarta tahun 2001 lalu terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk Indonesia, bahwa semakin “saleh” seseorang, justru ada kecenderungan semakin ia tidak toleran, bahkan tak jarang ia

menghalalkan tindakan anarkhis semisal pengrusakan tempat peribadatan dan pemukulan orang lain yang dianggapnya sesat. Apokaliptisisme (Setio, 2005: 204-205) yang menjangkiti sekelompok penganut agama dari Kristen, Islam, Yahudi, dan lainnya di berbagai belahan dunia merupakan fenomena “kesalehan” beragama yang membenarkan aksi kekerasan atasnama agama. Apokaliptisisme adalah pandangan sekelompok penganut agama bahwa dunia sekarang tengah berada dalam peperangan dimana kekuatan-kekuatan yang bermusuhan, kekuatan kebaikan dan kejahatan, kekuatan Tuhan dan setan, tengah saling bertempur. Sebagai umat beragama mereka terpanggil untuk mengambil bagian dalam perang itu. Mereka memandang diri mereka sebagai tentara Tuhan yang harus berjuang terus menghancurkan para pengikut pasukan setan.

Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, jelas patut disayangkan maraknya konflik kekerasan yang bisa mengoyak persatuan dan kesatuan warga serta keutuhan NKRI. Seharusnya disadari betul bahwa karena kearifan para pendahulu pendiri bangsa (*the founding fathers*) memilih Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip yang mendasari kemajemukan hidup berbangsa dan bernegara, cita-cita NKRI dapat diwujudkan dan diwariskan kepada generasi penerus sampai kini setelah sebelumnya dipertahankan dengan pengorbanan luar biasa dari para pejuang ibu pertiwi tercinta. Kenyataan ini sudah saatnya menginspirasi kita, generasi terdidik, untuk merefleksikan kearifan tersebut dan mengartikulasikannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sehingga kehadiran dan kiprah kita layak dinilai kontributif dalam merajut keharmonian, kerukunan, dan integrasi nasional. Ibarat sebuah pelangi, kemajemukan wargamasyarakat dan warga-negara justru mampu melahirkan mozaik keserasian dan keterpaduan warna-warni karena disikapi dan dikelola dengan penuh kearifan. Dalam istilah yang populer belakangan ini, kearifan tersebut dinamkan dengan kesadaran multikultural, yang sekarang sedang menghadapi ujian berat akibat menyeruaknya kecenderungan provinsialisme dan sektarianisme sebagian masyarakat di tengah carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus berlarut-larut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tentu keutuhan NKRI yang dibangun di atas prinsip Bhineka Tunggal Ika akan mengalami kerapuhan, terlebih manakala ditambah dengan menguatnya ketegangan ideologi Pancasila dan Islam (*Kompas*, 30/04/2010:2). Ketegangan ini berasal, antara lain, dari aspirasi politik sebagian umat Islam yang terus gigih berjuang untuk menegakkan syariat Islam tidak hanya pada tingkat kehidupan individu Muslim,

melainkan juga pada tingkat sistem dan institusi kenegaraan (Jamhari dan Jahroni (ed), 2004:v-xi). Menurut mereka, dalam memperjuangkan cita-cita tegaknya syariat Islam, tidaklah dibenarkan adanya toleransi kepada siapa pun, termasuk kepada non Muslim, dengan alasan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain fenomena tersebut, perlunya penguatan kesadaran multikultural juga didorong oleh perkembangan global (arus globalisasi) yang berdampak pada perjumpaan lintas budaya dan agama berlangsung amat intens (Hidayat, 2004a:89), sehingga diperlukan pemahaman terhadap keragaman budaya (global) secara tepat. Diantara wujud pemahaman yang tidak tepat adalah proses mengglobalnya nilai-nilai budaya, gaya hidup, falsafah, dan institusi-institusi yang berasal dari Barat sebagai sumber arus globalisasi ke seluruh lini kehidupan masyarakat dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan hingga urusan selera “perut” dan “aurat” cenderung dimaknai sebagai proses penyeragaman dan pembaratan budaya. Dengan kata lain, modernisasi yang selaras dengan tuntutan globalisasi meniscayakan pengadopsian secara total terhadap kultur Barat dan meninggalkan kultur lokal karena dinilai tidak lagi *compatible* dengan kemodernan. Kecenderungan ini ternyata memicu reaksi balik berupa sikap anti Barat pada sebagian masyarakat Muslim, karena mereka menganggap budaya Barat sebagai “lawan” dan mencurigai adanya misi tersembunyi di dalamnya untuk melemahkan Islam. Bahkan tidak hanya itu, ada juga dari mereka yang kemudian terkesan “mengeksplorasi” Islam untuk membenarkan segala aksi teror terhadap pihak-pihak yang dinilai menjadi representasi (simbol) hegemoni Barat dan Kristen, dengan dalih demi kejayaan agama Allah dan berjihad di jalanNya. Dalam kaitan ini, ideologi Islam transnasional yang memiliki jejaring lintas negara, menggunakan konsep umat (bukan *nation state*), dan mengadaptasi gagasan dan instrumen modern secara parsial (Ali, 2010:300-301) ---yang kini nampak mewabah di tanah air untuk terus mematangkan gerakan dan memobilisasi massa dalam rangka jihad global melawan Barat, pendirian Daulah Islamiyah, pemurnian Islam, dan sejenisnya--- bisa dinilai menjadi hambatan serius bagi keberhasilan proyek kerukunan antar agama dan demokratisasi di masa depan.

Mengapresiasi Universalitas Islam yang Inklusif-Multikultural

Salah satu kesadaran yang berakar kuat dalam pandangan seorang Muslim adalah Islam merupakan agama universal, agama untuk sekalian umat manusia. Sejarah

menunjukkan, pandangan ini melahirkan sikap sosial-keagamaan yang unik di kalangan umat Islam terhadap agama-agama lain atas dasar toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan dan kejujuran. Itulah manifestasi konkret nilai-nilai madani yang terbukti pernah menjadi pilar tegaknya masyarakat kosmopolit, masyarakat madani, Masa Keemasan dunia Islam dan masa awal Islam silam. Seperti diuraikan oleh Prof. Mulyadhi Kartanegara, nilai-nilai madani yang menyokong tegaknya masyarakat kosmopolit meliputi: *pertama*, inklusivisme, yaitu keterbukaan diri terhadap “unsur luar” melalui kemampuan melakukan apresiasi dan seleksi secara konstruktif. *Kedua*, humanisme, dalam artian cara pandang yang memperlakukan manusia semata-mata karena kemanusiaannya, tidak karena sebab lain di luar itu, semisal ras, kasta, kekayaan, dan agama. Termasuk kedalam humanisme di sini adalah sifat egaliter yang memandang manusia sama derajatnya. *Ketiga*, toleransi, yaitu adanya kelapangdadaan dan kebesaran jiwa dalam menyikapi perbedaan. *Keempat*, demokrasi yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan penyampaian kritik (2007:80-91).

Sikap sosial-keagamaan semacam itu jelas terlihat pada sikap dasar mayoritas umat Islam hingga sekarang (Madjid, 2000:179), meskipun mungkin sebagai *silent majority*, sehingga mampu hidup berdampingan secara damai dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain atas dasar saling memahami, saling menghargai, dan saling mempercayai. Menurut Cak Nur, sikap dasar tersebut dipandang sejalan dengan basis teologis bahwa (1) kemajemukan merupakan sunah Tuhan, (2) pengakuan hak eksistensi agama-agama lain, (3) titik temu/kontinuitas agama-agama, dan (4) tidak ada paksaan dalam agama (Madjid, 2000:177-196). Dasar normatif yang dapat disebutkan untuk menguatkan hal itu, antara lain adalah Qs. Yunus [10]: 19, Qs. Al-Baqarah [2]: 62, 112, 213, 256, Qs. Al-Maidah [5]: 48, Qs. Al-Nisa [4]: 125, Qs. Al-Nahl [16]: 36, dan Qs. Al-Kafirun [109]: 6. Kendati sikap keagamaan inklusif tadi memiliki basis yang kokoh, namun upaya realisasinya di lapangan ternyata tidak berlangsung mulus. Ideologisasi “kembali ke al-Qur’an dan sunah” yang dianut sebagian gerakan keagamaan kontemporer yang mengabsahkan sejumlah kampanye bernuansa kekerasan, baik berupa pemurtadan, penyerangan maupun terorisme merupakan salah satu tantangan terberat bagi sikap keagamaan inklusif tersebut. Sebab, kelompok gerakan keagamaan kontemporer ini mengidentifikasi Barat, nonmuslim, dan kalangan muslim yang dianggap tidak segaris dengan pemikirannya sebagai musuh (Misrawi, 2010:15). Di sini, sikap keagamaan inklusif seolah dipaksa harus berhadapan dengan sikap keagamaan

eksklusif-radikal yang tidak menyisakan ruang dialog dan kompromi dalam menyelesaikan permasalahan bersama.

Tidak hanya itu, tantangan lain yang dihadapi sikap keagamaan inklusif adalah masih kuatnya fiqih yang mengenalkan cara pandang kurang positif terhadap umat agama lain. Sejumlah kitab fiqih cenderung memuat pemikiran yang diskriminatif terhadap umat agama lain (Ghazali, 2009:9-10). Dalam tradisi fiqih, hubungan antar agama, Muslim dan non Muslim, agaknya belum memperoleh penyelesaian secara adil karena formulasinya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu (1) fiqih ditulis dalam masa dimana hubungan antara Muslim dengan non Muslim tidak begitu kondusif, (2) fiqih ditulis dalam situasi internal umat Islam yang tidak begitu solid, dan (3) adanya simbol-simbol keagamaan yang secara implisit menganjurkan sikap keras terhadap agama lain (Sirry (ed.), 2004:143). Jamal al-Banna mengistilahkan fiqih semacam ini dengan fiqih berdimensi degradasi (konservatif) yang tidak sejalan dengan paradigma kebangunan umat (2008:v-vi). Terkait dengan kebebasan beragama, model fiqih konservatif nampak menetapkan standar ganda, yakni kebebasan beragama hanya diakui bagi pemeluk agama lain yang ingin berpindah ke Islam atau tidak, sedangkan bagi pemeluk Islam tidak ada kebebasan beragama, antara tetap dalam Islam atau berpindah agama. Maka dari itu, pemeluk Islam yang kemudian berpindah agama tanpa keterpaksaan akan dikenai sanksi murtad berupa hukum bunuh (al-Ulwani, 2003:40). Fiqih konservatif cenderung menutup diri terhadap liberalisme, pluralisme, dan sekulerisme. Menurut al-Banna, memfatwa haram terhadap ketiga paradigma tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh fiqih konservatif merupakan sebuah sikap yang tidak bijaksana (2008:xi-xii). Sebab, ketiga paradigma itu sebenarnya mempunyai kesesuaian dengan Islam yang menjunjung tinggi kebebasan (semisal kebebasan beragama dan kebebasan berpikir), Islam yang menghargai keragaman sebagai kebutuhan manusia dan takdir Tuhan, Islam yang menolak adanya dominasi dalam ranah keagamaan dan menentang perlunya negara Islam.

Pada dataran doktrinal-normatif, jika dilakukan pembacaan secara dialektis-hermenutis, maka al-Qur'an sesungguhnya sangat radikal, liberal, dan arif dalam menyikapi keanekaragaman (pluralitas) agama-agama (Abdullah, 2000:73,78). Diungkapkan dalam al-Qur'an bahwa Kebenaran Universal, Kebenaran Perennial, adalah tunggal karena berasal dari Sumber yang Sama walaupun ada kemungkinan manifestasi lahiriahnya (dimensi eksoteriknya) beraneka ragam. Pangkal kebenaran universal itu

(dimensi esoteris) adalah *tawhid* yang memiliki konsekuensi kesediaan diri pasrah (*islam*) kepadanya. Konsep kesatuan dasar ajaran ini membawa kita menuju pengakuan konsep kesatuan misi kenabian/kerasulan, yang pada gilirannya membawa kita menuju pengakuan konsep kesatuan umat manusia yang beriman. Meski pun begitu, keunikan agama tetap perlu dipertahankan dan diapresiasi, yang ditunjukkan dengan komitmen seseorang terhadap ajaran agama yang telah dianutnya dalam kerangka kebenaran universal tersebut sehingga tidak mengarah pada *truth claim* sepihak yang berlebihan, eksklusif, dan eksekusif. Dengan lain kata, setiap pemeluk agama harus memutlakkan kebenaran agama yang dianutnya, namun bersamaan ini ia juga memberikan kemungkinan bagi orang lain yang menganut agama yang berbeda untuk memutlakkan agama yang dianutnya (Hidayat dan Nafis, 1995:14). Atas dasar itu, sangat beralasan sekiranya dikatakan bahwa al-Qur'an mengusung kesadaran mengenai adanya kemajemukan keagamaan (*religious pluralism*), yang mendasari sikap toleransi, keterbukaan, dan kejujuran yang menonjol terhadap agama lain seperti pernah ditampilkan dalam sejarah Islam (Madjid, 2000:188). Ini mengandung arti kita dituntut menyikapi segala bentuk perbedaan dengan baik, wajar, dan tulus sebagai sarana *fastabiqul khairat*, percaya bahwa menghargai keberadaan orang lain dan segala perbedaannya tidak otomatis menghilangkan eksistensi diri karena kita justru semakin bisa mengenali diri sendiri ketika kita semakin mengenali yang lain, dan membangun komunikasi secara baik dan penuh keterbukaan (dialog) dengan kelompok yang berbeda.

Pengakuan kebenaran universal yang menjadi titik temu agama-agama semestinya mampu mendorong penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan agama. Kebaikan beragama dilihat dari kesungguhan seseorang mengimani Tuhannya dan kesediaan diri berbuat baik terhadap sesamanya. Dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara yang plural, tipe keberagamaan yang menekankan orientasi kemanusiaan ini perlu mendapat apresiasi dan penekanan. Hikmah hidup keberagamaan haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan (Hidayat, 1998:64-65). Agama dalam hal ini dihayati sebagai wadah, ekspresi dan manifestasi pencarian makna hidup manusia melalui aktualisasi kemanusiaannya (Hidayat dan Nafis, 1995:133). Jika agama memang diwahyukan untuk manusia, bukan manusia untuk agama, maka salah satu parameter utama penilaian baik-buruknya sikap hidup beragama adalah dengan menggunakan standar dan kategori kemanusiaan, bukannya ideologi dan sentimen kelompok. Pada

dataran praktis, karya kemanusiaan itu misalnya berupa kesungguhan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, menegakkan nilai-nilai keadilan, dan merajut kerukunan hidup bersama dalam perbedaan. Sekiranya nilai-nilai universal agama dan kemanusiaan yang dikedepankan dan diartikulasikan dalam tatanan hukum dan etika sosial yang disepakati dan dijaga bersama, maka konstruksi teologis-psikologis *God of Battles* akan berubah menjadi *God of Love* dan *God of Peace* (Hidayat, 2004b:233-234), sehingga konflik dan kekerasan yang mengatasmakan Tuhan dan agama bisa dicegah digantikan dengan “nalar” dan “rasa” keagamaan yang melahirkan sikap rendah hati, terbuka, toleran, dan selalu rela belajar menerima perbedaan serta belajar dari perbedaan.

Setidaknya terdapat tiga hal yang menegaskan Islam sebagai agama yang mengusung visi kemanusiaan (Misrawi, 2010:52-55). *Pertama*, Islam adalah agama yang berpijak pada konsep fitrah. Dengan fitrahnya, manusia berkesiapan untuk mengenal Tuhannya dan mengembangkan kemanusiaanya karena telah dibekali potensi diri sedari lahir. *Kedua*, Islam adalah agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Islam bersifat moderat, adil, dan jalan tengah. Prinsip ini hendaknya menjadi fondasi umat Islam dalam membangun tata kehidupan yang harmonis, baik dalam konteks intraagama maupun interagama. Dengan cara itulah, umat Islam sebagai golongan mayoritas di negeri ini akan menjadi umat yang bisa memberikan harapan untuk lahirnya kehidupan yang lebih mengedepankan dialog dan perdamaian. *Ketiga*, Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan tatanan publik, kemaslahatan bagi segenap manusia tanpa pandang bulu, bukan kemaslahatan segelintir orang saja.

Pendidikan Agama dalam Bingkai Pendidikan Religiusitas

Hubungan harmonis antar umat beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Karena itu, secara serius perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu kualitas hubungan yang lebih baik antar umat beragama (Taher, 1998:40). Setidaknya terdapat tiga wacana yang mewarnai hubungan Muslim-Non Muslim, khususnya Kristen, dalam kehidupan berbangsa di tanah air, yaitu wacana kaum Muslim tentang ancaman Kristenisasi, wacana kaum Kristen tentang ancaman negara Islam, dan wacana bersama yang dikembangkan melalui dialog antar agama (Mujiburrahman, 2008:244). Pada masa Orde Baru, wacana yang bersifat antagonistik, saling merasa terancam, dinilai masih begitu kuat dibandingkan dengan wacana bersama yang dikembangkan melalui dialog.

Bahkan menurut Franz Magnis-Suseno, hubungan Islam dan Kristen di Indonesia pernah menunjukkan hubungan yang paling kritis (mengkhawatirkan) (Suseno, 2005:9-13). Dengan demikian, cukup beralasan sekiranya dikatakan bahwa upaya mewujudkan pendidikan multikultural menghadapi tiga tantangan utama, yaitu (1) agama, etnisitas, dan tradisi, (2) kepercayaan, dan (3) toleransi (Tilaar, 2005:266-268). Kuatnya wacana yang bersifat antagonistik tersebut mengisyaratkan perbedaan agama, suku, dan tradisi ternyata masih rentan menimbulkan sikap saling curiga dan saling merasa terancam satu sama lain yang kemudian mendorong ketegangan, tindak kekerasan, penyesatan, dan aksi teror.

Salah satu upaya mewujudkan hubungan yang harmonis adalah melalui kegiatan pendidikan multikultural, yakni kegiatan edukasi dalam rangka menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku (*mode of action*) peserta didik terhadap keragaman agama, budaya dan masyarakat. Dengan pengertian itu, pendidikan multikultural bisa mencakup pendidikan agama dan pendidikan umum. Tentu saja pendidikan multikultural di sini tidak sekedar membutuhkan “pendidikan agama”, melainkan juga “pendidikan religiusitas”. Pendidikan religiusitas mengandung arti pendidikan yang tidak sebatas mengenalkan kepada peserta didik ajaran agama yang dianutnya, melainkan juga mengajarkannya penghayatan visi kemanusiaan ajaran agama tersebut. Hal ini diperlukan untuk menghadapi era globalisasi, agar umat beragama tidak dikungkung oleh pandangan kebangsaan sempit dan parokialistik (Madjid, 2000:xviii-xix). Maka dari itu, pendidikan agama di Indonesia setidaknya mempunyai dua fungsi (Taher, 1998:72-73). Fungsi pertama adalah mendukung kebutuhan agama para peserta didik untuk memperkuat keimanan mereka. Dalam hal ini, pendidikan agama berarti tersedianya pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing peserta didik. Fungsi keduanya adalah untuk meningkatkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, kerukunan antar-agama, dan persatuan dan kesatuan nasional.

Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokratis. Indonesia adalah negara yang didasarkan pada Pancasila. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, orang-orang dengan afiliasi agama yang berbeda dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk memeluk salah satu agama yang diakui
2. Kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya
3. Menahan diri dari menyebarkan agama kepada mereka yang telah memeluk agama tertentu

4. Tanggungjawab untuk memajukan dan mempertahankan kerukunan antar berbagai kelompok agama dengan semangat saling menghormati dan kerjasama, demi persatuan nasional dan kesatuan umat manusia (Taher, 1998:67-68).

Pancasila dinilai sebagai obyektifikasi dari Islam dan agama-agama lainnya juga menemukan dirinya dalam rumusan Pancasila (Kuntowijoyo, 2002:215). Dengan obyektifikasi Islam, ia adalah artikulasi Islam dalam semangat kebangsaan yang plural dan titik temu (*common denominator*) berbagai agama yang ada untuk mewujudkan kerukunan hidup bersama. Diletakkan dalam bingkai Pancasila, pendidikan agama dituntut mempunyai visi kebangsaan dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ini artinya pendidikan agama diharapkan mampu menyalakan nyali peserta didik untuk mengarungi kehidupan dalam dekapan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat tanpa merasa terancam sedikitpun oleh keberadaan “orang lain”. Pendidikan agama semestinya menyadarkan peserta didik bahwa perbedaan perlu dilihat sebagai anugerah, tidak dilihat sebagai pilihan yang memberi alternatif untuk segera menyudahi perbedaan tersebut semisal dengan ideologisasi Islam yang mengarah pada upaya-upaya menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila (Anwar, 2006:xvi). Sekiranya perbedaan dianggap anugerah, maka pendidikan agama mengemban tanggungjawab mendorong prakarsa dialog dan komunikasi positif dalam rangka mewujudkan saling memahami, saling menghargai, dan saling mempercayai agar keragaman dan perbedaan tidak menuai malapetaka.

Sejalan dengan tanggungjawab tersebut, M. Amin Abdullah menggarisbawahi lima tugas utama pendidikan (agama) Islam, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam menghadapi keragaman agama, yaitu (1) mengenalkan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam, bersamaan dengan upaya menjelaskan ajaran Islam klasik, (2) mengarahkan tujuan utama Islam pada pemecahan permasalahan mengenai hubungan antar manusia, (3) mengkontekstualisasikan Islam, (4) mengkritisi penekananan pendidikan agama hanya pada domain kognitif, dan (5) mendedikasikan Islam tidak semata-mata untuk pengembangan moralitas individu, melainkan juga moralitas publik (2010:139-140). Salah satu sasaran tuju dari tugas utama tersebut adalah pendidikan agama bisa membekali peserta didik kecakapan hidup (*life skill*) berupa kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sepanjang kehidupannya di tengah realitas masyarakat yang plural (Zamroni, 2007:228). Konsekuensinya, pendidikan agama perlu menekankan pada bagaimana mengajarkan

tentang agama (*teaching about religion*) yang melibatkan pendekatan kesejarahan dan pendekatan perbandingan (Baidhawiy, 2005:102). Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai aspek universal dan partikular ajaran agamanya. Disamping itu, pendekatan tersebut bermanfaat juga untuk mengatasi kurangnya perhatian selama ini terhadap upaya mempelajari agama-agama lain dan kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar umat beragama dikarenakan sikap *overprotective* sehingga kecurigaan tetap mewarnai cara pandang antar penganut agama. Secara psikologis, manfaat dari pendekatan tadi bisa mengondisikan peserta didik agar belajar bersikap inklusif dan positif terhadap agama lain dan kelompok yang berbeda.

Bertolak dari tugas utama di atas, sudah saatnya pendidikan agama lebih menekankan transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral daripada sekedar transfer ilmu agama (kognitif). Sebab, pendidikan agama tidak hanya terbatas pada pengajaran agama. Kegagalan pendidikan agama dalam membina akhlak peserta didik sebagaimana telah dikeluhkan oleh banyak pihak merupakan wujud transformasi nilai keagamaan dan moral belum berlangsung dengan baik. Sewajarnya jika penguasaan peserta didik tentang materi keagamaan dinilai bagus, ternyata hal ini belum tentu berkorelasi kuat dengan keluhuran akhlaknya. Kejujuran, ketulusan, kesabaran, tanggungjawab, dan keuletan misalnya tidak terlihat dari sikap dan perilaku keseharian yang bersangkutan. Cak Nur menegaskan bahwa transformasi nilai keagamaan dan moral dalam proses pendidikan agama hendaknya berkisar pada dua dimensi hidup: penanaman rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama (Madjid, 2001:xiii-xxi). Pada dimensi pertama, tujuan pokoknya adalah menginsafkan peserta didik akan kebesaran dan keagungan Tuhan melalui penghayatan yang mendalam terhadap makna ibadah dan perenungan mendalam terhadap alam semesta dan kehidupan. Terkait dengan dimensi ini, nilai-nilai mendasar yang perlu ditanamkan dalam kegiatan pendidikan, antara lain: iman, islam, ihsan, ikhlas, syukur, dan sabar. Selanjutnya, pada dimensi kedua, pendidikan bermaksud mengembangkan moralitas individu dan moralitas publik peserta didik. Untuk itu, termasuk nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah: persaudaraan, persamaan, rendah hati, lapang dada, baik sangka, tepat janji, dan silaturahmi.

Mendialogiskan Pendidikan Agama Islam

Mendialogiskan di sini mengandung arti upaya mewujudkan pendidikan agama Islam yang bisa mengapresiasi “upaya-memahami” (*understanding*) sebagai inti dalam kegiatan pembelajarannya, mengingat subyek yang terlibat bukanlah benda mati. Simpati, empati, toleransi, dan kerjasama adalah contoh sebagian sikap yang hanya dimiliki oleh subyek yang mampu memahami. Adanya kekerasan dalam pendidikan, penghakiman sepihak, dan monopoli kebenaran menunjukkan masih rendahnya upaya-memahami melandasi praktik kegiatan edukasi. Dalam kehidupan bersama, kebenaran acapkali memerlukan saling-pemahaman, sehingga komunikasi dan dialog dinilai amat fundamental. Atas dasar itu, sepantasnya jika pedagogik komunikatif dan pedagogik dialogis menjadi bagian dari prinsip pokok pedagogi transformatif (Tilaar, 2002:297-298), yakni tindakan mendidik yang didasarkan pada teori/konsep, antara lain, proses individuasi dalam kerangka partisipasi, kebudayaan sebagai praksis pendidikan, penekanan lebih pada pembelajaran daripada pengajaran, dan pendidikan sebagai proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Sesuai dengan pedagogik komunikatif dan dialogis, subyek dilihat hanya bisa eksis di dalam kebersamaan dengan subyek yang lain; kegiatan belajar menjadi bermakna ketika ada dialog antar subyek dan ada partisipasi di dalamnya.

Karena itu, pendekatan hermeneutis perlu diterapkan untuk mendialogiskan pendidikan agama. Penerapan ini mengandung maksud, pada orientasi keluar, pendekatan hermeneutis menuntut dunia pendidikan, terutama pendidikan agama, bersedia melakukan proses dialog dengan tradisi, dengan realitas sosial-budaya (kondisi dan ekspektasi sosial) dalam rangka menemukan signifikansinya, sedangkan pada orientasi kedalam, pendekatan hermeneutis menuntut agar asas *understanding* dan *empathy* melandasi segala kegiatan edukasi (Arif, 2008:247). Konsekuensinya, pendidikan agama memang harus dinamis dan dialektis, sehingga tidak dibenarkan jika pendidikan agama cuma berkuat pada pelestarian tradisi secara konservatif dan abai untuk merespons secara konstruktif desakan kebutuhan lingkungan. Tak hanya itu, pendidikan agama juga harus andil besar memupuk solidaritas antar peserta didik, antar elemen masyarakat, agar suasana kerukunan dan kebersamaan menjadi kenyataan kendati mereka menjalani hidup dalam banyak kebhinekaan.

Seorang guru yang mengapresiasi upaya-memahami semestinya senantiasa memikirkan apa makna materi yang diajarkan bagi dirinya dan apa makna materi tersebut bagi para peserta didiknya (Kneller, 1984:96). Diletakkan dalam konteks pluralitas

agama, budaya, dan masyarakat, diantara makna yang perlu dipikirkan adalah menyangkut pengembangan *how to live and work together with others*, bagaimana hidup dan bekerja bersama dengan orang lain. Dengan demikian, dalam pendidikan agama guru dituntut untuk bersifat reflektif yang mengedepankan sintesis, dialog, dan *caring* (Zamroni, 2007:274). Sintesis bermakna guru harus selalu bisa memadukan materi pembelajaran dengan realitas sosial yang ada, khususnya latarbelakang peserta didik. Dialog bermakna guru menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk menjadi pendengar yang baik, cakap menganalisis, dan tangkas memberikan argumen balik secara santun. *Caring* bermakna guru harus menjadi figur yang penuh perhatian, tanggap terhadap kebutuhan, dan peduli akan nasib peserta didik.

Mendialogiskan pendidikan agama berarti menghindarkan kegiatan edukasi dari proses domestifikasi, stupidifikasi, dan indoktrinasi (Tilaar, 2003:90). Domestifikasi terjadi manakala kegiatan edukasi justru “menjinakkan” kreativitas, keberanian bertanya, dan kekritisian peserta didik. Dalam kegiatan edukasi, agama dan pemikiran keagamaan disampaikan sebagai dogma yang tidak perlu lagi dipertanyakan dan dikaji ulang. Pendidikan agama sarat dengan pengenalan ancaman-ancaman yang menakutkan terkait dengan sesat, dosa, dan neraka (Suyanto, 2006:149). Stupidifikasi terjadi ketika transmisi pengetahuan dan nilai keagamaan dalam kegiatan edukasi tidak disertai proses penalaran sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Di sini, peserta didik hanya cukup menerima secara pasif apa yang disampaikan oleh guru, menghafalkannya dengan baik, dan mengulang-ulangnya agar tidak mudah lupa. Sementara itu, indoktrinasi dapat dilihat dari kegiatan edukasi yang sibuk menjejali peserta didik dengan serangkaian tuntunan agama yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan sepenuh hati secara taklidiah. Peserta didik digiring untuk mau menyakininya secara total sebagai kebenaran “tunggal” dan “final”.

Kegiatan edukasi yang mengarah pada domestifikasi, stupidifikasi, dan indoktrinasi bertemalian erat dengan kurikulum (muatan materi) yang bersifat absolut, pedagogi yang berbentuk alih pengetahuan, dan sistem evaluasi yang bersifat reproduksi pengetahuan yang telah dipelajari (Sutrisno, 2001:206-208). Dengan karakteristik seperti itu, pendidikan agama pun pada gilirannya sulit diharapkan untuk sanggup mencerahkan dan memberdayakan peserta didik, atau sulit diharapkan sanggup mengilhaminya melakukan refleksi dan aksi guna mengartikulasikan ajaran agama secara cerdas dan penuh tanggungjawab. Kegiatan edukasi yang salah dalam menginternalisasikan ajaran

agama pada peserta didik justru akan menyuburkan gejala pendangkalan agama, semisal fanatisme sempit dan radikalisme keagamaan, yang menegasikan makna dialog untuk menguntai pernak-pernik kemajemukan.

Penutup

Kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat di Indonesia merupakan realitas tak terbantahkan yang memerlukan kearifan masing-masing kita dalam mengelolanya. Tanpa kearifan, kemajemukan tersebut bisa bagaikan “api dalam sekam” yang kapan saja siap menghancurkan pilar-pilar bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan pendidikan sangat diperlukan untuk menumbuhkembangkan kearifan peserta didik, agar nantinya mereka mampu berperan dalam merawat kemajemukan tadi dan mendayagunakannya untuk meraih kemaslahatan hidup bersama. Dengan demikian, pendidikan agama Islam mengemban misi penting mendekatkan peserta didik dengan tuntunan Islam dan mentransformasikan nilai-nilai Islam yang inklusif-multikultural kepada mereka. Pendidikan agama sudah seharusnya lebih “didialogiskan” agar kegiatan edukasinya mampu menutrisi tumbuhkembang kearifan multikultural peserta didik.

Pendidikan agama mengemban tugas mentransformasikan visi kemanusiaan dan nilai-nilai universal agama kepada peserta didik, seperti inklusivisme, humanisme, toleransi, dan demokrasi, yang memang dibutuhkan untuk menopang tegaknya masyarakat madani. Bukan sebaliknya, pendidikan agama justru berperan menghasilkan manusia *mutlak-mutlakan*, yang hanya bisa merasa benar sendiri dan pandai menyalahkan atau bahkan menyesatkan orang lain. Maka dari itu, pendidikan agama diharapkan mampu melaksanakan fungsi internalisasi ajaran agama yang dianut peserta didik dalam sinaran pendidikan religiusitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2000. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer*, Bandung: Mizan.
- Abdullah, M. Amin. 2010. *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka*, Yogyakarta: Suka Press.
- Ali, As'ad Said. 2010. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES.

- Anwar, M. Syafi'i. 2006. Kata Pengantar dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, h. xvi, Jakarta: The Wahid Institute.
- Arif, Mahmud. 2008. *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: LKiS.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga.
- al-Banna, Jamal. 2008. *Nahwa Fiqh Jadid I, Manifesto Fiqih Baru I: Memahami Diskursus Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, diterjemahkan oleh Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi.
- Ghazali, Abd. Moqsith. 2009. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Jakarta: Kata Kita.
- Hidayat, Komaruddin dan M. Wahyuni Nafis. 1995. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta: Paramadina.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Hidayat, Komaruddin. 2004a. Merawat Keragaman Budaya dalam Tonny D. Widiastono (ed.), *Pendidikan Manusia Indonesia*, h. 89, Jakarta: Buku Kompas.
- Hidayat, Komaruddin. 2004b. *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Teraju.
- Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.). 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kartanegara, Mulyadhi. 2007. *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kneller, George F. 1984. *Movements of Thought in Modern Education*, New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Kompas* (Jum'at, 30 April 2010).
- Kuntowijoyo. 2002. *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas*, Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. 2001. Pengantar: Pendidikan, Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas dalam Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, h. xiii-xxi, Jakarta: Paramadina.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis.
- Mujiburrahman. 2008. *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setio, Robert. 2005. Kekerasan dalam Apokaliptisisme dalam Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan*, h. 204-205, Yogyakarta: Oasis Publisher.
- Sirry, Mun'im A. (ed.). 2004. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina.
- Suseno, Franz Magnis. 2005. Kerukunan Beragama dalam Keragaman Agama: Kasus di Indonesia, dalam Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan*, h. 9-13, Yogyakarta: Oasis Publisher.
- Sutrisno, Leo. 2001. Pluralisme Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme dalam Th. Sumartana, dkk., *Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, h. 206-208, Yogyakarta: Interfidei dan Pustaka Pelajar.
- Suyanto. 2006. *Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global*, Jakarta: PSAP.

- Taher, Tarmizi. 1998. *Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia*, Jakarta: PPIM IAIN Jakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Indonesiatara.
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, Jakarta: Buku Kompas.
- Ulwani, Thaha Jabir al-. 2003. *La Ikraha Fi al-Din: Isykaliyyat al-Riddah wa al-Murtaddin min Shadr al-Islam Hatta al-Yawm*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*, Jakarta: PSAP.

Biodata Singkat Penulis

Mahmud Arif adalah Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sejak tahun 2009, ia diamanati untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Prodi S2 PGMI/PGRA PPs UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, hingga kini ia punya kesibukan tambahan sebagai anggota asesor BAN PT Diknas. Diantara karya tulis dalam bentuk buku yang telah dihasilkannya adalah *Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam* (Tiara Wacana, 2002), *Filsafat Pendidikan* (Gama Media, 2007), *Pendidikan Islam Transformatif* (LKIS, 2008), *Menyelami Makna Kewahyuan Kitab Suci* (Idea Press, 2009), dan *Panorama Pendidikan Islam* (Idea Press, 2009).